

# Peran Antropolog dalam perencanaan pembangunan yang berbasis kearifan lokal

Mubarak Dahlan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar  
[mubarakdahlan@unm.ac.id](mailto:mubarakdahlan@unm.ac.id)

---

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis antropolog dalam perencanaan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini menemukan bahwa antropolog memiliki kontribusi penting dalam beberapa aspek. Pertama, antropolog berperan sebagai peneliti budaya yang mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menganalisis kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan. Kedua, antropolog berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara perencana pembangunan (pemerintah, swasta) dengan masyarakat lokal, sehingga kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan konteks setempat. Ketiga, antropolog berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan potensi konflik yang muncul akibat benturan antara proyek pembangunan dan nilai-nilai lokal. Keempat, antropolog terlibat dalam proses evaluasi dampak sosial budaya dari suatu proyek pembangunan untuk memastikan keberlanjutannya. Dengan demikian, keterlibatan antropolog sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan bukan sekadar pelengkap, melainkan keharusan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

## Abstract

*This article aims to examine the strategic role of anthropologists in development planning based on local wisdom. Through a qualitative approach based on literature, this article finds that anthropologists make important contributions in several aspects. First, anthropologists act as cultural researchers who are able to identify, document, and analyze local wisdom as social capital for development. Second, anthropologists function as a communication bridge between development planners (government, private sector) and local communities, so that formulated policies are truly in line with local needs and contexts. Third, anthropologists act as mediators and facilitators in resolving potential conflicts that arise from clashes between development projects and local values. Fourth, anthropologists are involved in the process of evaluating the sociocultural impacts of a development project to ensure its sustainability. Thus, the involvement of anthropologists from the planning stage to the evaluation of development is not merely complementary, but rather a necessity for realizing equitable, participatory, inclusive, and sustainable development.*

## Keywords

Antropolog; perencanaan; pembangunan; kearifan lokal; dampak sosial

# 1. Pendahuluan

Mengacu pada kenyataan dewasa ini, perencanaan pembangunan di era kontemporer menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama ketika berhubungan dengan masyarakat urban yang heterogen (Djumaty et al., 2025) dari aspek budaya, sosial, agama, bahasa, dan ekonomi. Sementara itu kegagalan pembangunan sering kali juga muncul tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknis atau keterbatasan anggaran, melainkan juga dipicu oleh faktor ketidakmampuan memahami realitas sosial budaya masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan oleh Kottak (2015) dalam studinya bahwa benturan budaya terkait perubahan lingkungan. Hal ini terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia dapat terjadi ketika pembangunan mengancam masyarakat adat dan lingkungan mereka. Benturan budaya ini semakin terasa dan menggejala di wilayah perkotaan, di mana berbagai kelompok etnis, kelas sosial, dan tradisi budaya hidup berdampingan dalam wilayah yang terbatas. Akibatnya, proyek pembangunan yang dirancang tanpa pemahaman mendalam tentang konteks lokal berisiko tinggi mengalami penolakan, konflik sosial, atau bahkan kegagalan total.

Di sisi lain kenyataan menunjukkan bahwa kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan dan nilai yang hidup dalam masyarakat (Zulkarnaen et al., 2022) kemudian dipinggirkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan modern yang tampaknya lebih cenderung mengadopsi pendekatan teknokratis sebagai tujuannya. Hal ini berseberangan dengan penjelasan Berkes (2018) melalui kajian antropologi ekologinya, dimana pengetahuan tradisional sebenarnya memiliki nilai empiris yang sangat berharga, yang diperoleh melalui observasi ekstensif terhadap suatu area atau spesies, dan diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Dalam konteks pembangunan perkotaan, kearifan lokal dapat mencakup sistem pengelolaan air tradisional, pola permukiman yang adaptif terhadap lingkungan, atau mekanisme resolusi konflik berbasis masyarakat. Escobar (2011), dalam kritiknya terhadap wacana pembangunan, menegaskan bahwa tantangannya bukanlah mencari "pembangunan alternatif" melainkan menciptakan "alternatif terhadap pembangunan" itu sendiri—sebuah pemikiran yang menuntut pengakuan terhadap ontologi dan cara hidup yang beragam di luar kerangka modernitas Barat.

Berangkat dari beberapa kenyataan dunia kontemporer tersebut maka peran antropolog dalam konteks pembangunan termasuk wilayah perkotaan menjadi semakin strategis. Maksudnya dalam upaya untuk menjembatani kesenjangan antara perencana pembangunan dan masyarakat urban sebagai warga kota yang memiliki hak-hak sebagai warga. Dalam hal ini Antropolog tidak hanya berperan sebagai pihak yang bekerja untuk mendokumentasikan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai "penafsir budaya" yang mampu memenuhi aspirasi warga, berorientasi nilai, dan berbebas kebutuhan masyarakat untuk kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa kebijakan pembangunan. Setiawan dan Haryanto (2019), melalui studi dengan menggunakan pendekatan seni dan desain partisipatif yang inklusif dan kolaboratif telah terbukti efektif dalam menumbuhkan rasa memiliki warga terhadap lingkungannya, sehingga mendorong terciptanya keberlanjutan permukiman urban.

Di Indonesia khususnya pada kota-kota besar yang tersebar dari Sabang sampai Maraoke saat ini sedang bergulat dengan isu pembangunan berkelanjutan, krisis identitas, dan ketimpangan sosial seperti halnya yang dialami oleh kota-kota lainnya di Asia Tenggara. Dengan demikian kondisi seperti ini memerlukan kehadiran antropolog sebagai tim kerja dan pihak perencana pembangunan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak sekarang ini. Fenomena seperti urbanisasi massal yang teka terkendali ternyata telah menciptakan permukiman yang sangat padat penduduk dengan berdampak pada kehidupan sosial yang tinggi dan mengandung masalah, di mana pendekatan pembangunan konvensional sering kali gagal karena mengabaikan jaringan relasi sosial yang sangat dibutuhkan, kemudian tentang nilai-nilai komunal, dan kearifan lokal yang diharapkan masih hidup. Antropolog dalam hal ini, dengan metode etnografi sebagai andalan metodologinya serta kemampuannya melakukan pendekatan holistik, dapat mengidentifikasi

hal-hal yang menjadi perhatian sebenarnya sangat diperlukan pada zaman sekarang.

Artikel ini mengkaji tentang peran antropolog dalam perencanaan pembangunan yang berbasis kearifan lokal di kawasan urban. Fokus pembahasan meliputi: (1) kontribusi antropolog dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan; (2) fungsi antropolog sebagai jembatan komunikasi antara pemangku kepentingan pembangunan dengan masyarakat urban; (3) peran antropolog dalam mediasi dan resolusi konflik yang timbul akibat proyek pembangunan; serta (4) keterlibatan antropolog dalam evaluasi dampak sosial budaya (*social impact assessment*) untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan merujuk pada berbagai studi kasus di Indonesia dan negara-negara Selatan lainnya, artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa keterlibatan antropolog sejak tahap perencanaan hingga evaluasi merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan perkotaan yang inklusif, partisipatif, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Rahman et al., 2022). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui pendekatan antropologi. Penelitian kepustakaan ini merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan data menggunakan sumber pustaka, yang dilakukan melalui kegiatan membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Adapun data-data yang dibutuhkan bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel, dan berbagai literatur lainnya. Pendekatan antropologi dipilih dengan alasan memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pembangunan dan kearifan lokal secara holistik, kontekstual, dan berperspektif emik (pandangan dari dalam masyarakat), sebagaimana ditekankan dalam tradisi antropologi budaya (Spradley, 2016). Kombinasi antara studi pustaka dan pendekatan antropologi ini bertujuan untuk mengkaji peran antropolog dalam perencanaan pembangunan berbasis kearifan lokal dengan melihat dinamika sosial budaya, relasi kuasa, serta nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat urban.

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori. Data primer meliputi buku-buku teks antropologi pembangunan, jurnal ilmiah nasional maupun internasional terindeks, serta artikel hasil penelitian yang secara khusus membahas tentang: (a) peran antropolog dalam pembangunan, (b) kearifan lokal di kawasan urban, (c) perencanaan pembangunan partisipatif, dan (d) studi kasus kegagalan atau keberhasilan pembangunan berbasis budaya. Data sekunder mencakup laporan penelitian, disertasi, tesis, prosiding seminar, dokumen kebijakan pemerintah terkait pembangunan perkotaan dan pelestarian budaya.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari, mengumpulkan, dan mencatat informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan (Sugiyono, 2019). Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, peneliti menentukan kata kunci pencarian (*keywords*) yang mencakup istilah-istilah kunci seperti: "peran antropolog", "pembangunan perkotaan", "kearifan lokal urban", "antropologi pembangunan", "perencanaan partisipatif", "etnografi pembangunan", "kebijakan berbasis budaya", "*urban anthropology*", "*development anthropology*", "*indigenous knowledge*", "*participatory development*", dan "*culturally sensitive planning*". Kedua, pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan perpustakaan digital institusi seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ketiga, melakukan seleksi awal terhadap literatur yang ditemukan berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci untuk menilai relevansinya. Keempat, peneliti mengakses teks lengkap (*full text*) dari literatur yang lolos seleksi. Kelima, peneliti membaca secara kritis dan mencatat secara sistematis informasi-informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, dengan memberi perhatian khusus pada konteks sosial-budaya, metode penelitian yang digunakan dalam literatur asli, serta temuan-temuan empiris tentang peran antropolog dalam

pembangunan.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dengan perspektif antropologi kritis. Analisis isi adalah teknik sistematis untuk menganalisis makna dan pesan dari suatu dokumen atau teks dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorff, 2018). Adapun pendekatan antropologi kritis digunakan untuk membongkar asumsi-asumsi yang tersembunyi dalam wacana pembangunan serta mengungkap relasi kuasa antara perencana pembangunan (pemerintah, swasta) dan masyarakat lokal (Escobar, 2011). Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelusuran data pada berbagai sumber pustaka yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa penelitian ini menemukan bukti kuat bahwa antropolog memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan namun sering kali diabaikan dalam proses perencanaan pembangunan, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki permasalahan krusial baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Kottak (2015) menegaskan bahwa antropolog pembangunan memiliki keahlian yang unik khususnya dalam memahami dinamika lokal, struktur sosial, dan sistem nilai masyarakat yang sering kali luput dari perhatian para perencana konvensional. Hasil temuan ini diperkuat oleh hasil studi Escobar (2011) yang melakukan kritik terhadap wacana pembangunan modern yang dinilai sebagai proyek yang sarat dengan asumsi-asumsi Barat (proyek westernisasi). Sebaliknya dalam perencanaan kota termasuk pembangunan sektor pariwisata cenderung mengabaikan pengetahuan lokal yang sebenarnya sangat dibutuhkan sebagai bagian dari identitas (Dahlan, 2023).

Studi etnografi hubungannya dengan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan adanya proyek pembangunan infrastruktur, relokasi permukiman, dan pengelolaan sumber daya alam sering kali dianggap mengalami kegagalan atau penolakan masyarakat karena tidak melibatkan antropolog sejak tahap perencanaan (Setiawan & Haryanto, 2019). Bahkan di perkotaan yang diasumsikan lebih "modern" dan "rasional", nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dan berperan penting dalam membentuk preferensi, resistensi, dan strategi adaptasi masyarakat terhadap intervensi pembangunan. Dengan demikian, keterpinggiran antropolog dalam tim perencana pembangunan bukanlah masalah teknis semata, melainkan kegagalan sistemik dalam mengakui pentingnya dimensi sosial budaya.

Hasil penelusuran sumber pustaka kedua memberi informasi bahwa peran utama antropolog dalam perencanaan pembangunan berbasis kearifan lokal adalah sebagai dalam kapasitas sebagai peneliti, pendokumentasi, dan penterjemah kearifan lokal menjadi strategis dalam implementasi kebijakan pembangunan. Berkes (2018) yang melakukan studi tentang ekologi sakral menjelaskan bahwa pengetahuan tradisional sebenarnya tidak tersusun dalam bentuk manual atau buku panduan. Akan tetapi sebaliknya terdistribusi dalam aktivitas sosial, ritual, cerita lisan, dan kearifan turun-temurun. Tugas antropolog dalam hal ini adalah berusaha mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengartikulasikan pengetahuan tersebut ke dalam bahasa dan konsep yang dengan mudah dapat dipahami oleh perencana pembangunan tanpa mereduksi kompleksitasnya.

Kearifan lokal di area perkotaan dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti misalnya berupa sistem pengelolaan air berbasis komunitas, pola permukiman yang adaptif terhadap banjir, mekanisme gotong royong dalam pemeliharaan fasilitas umum, atau aturan adat tentang pemanfaatan ruang publik (Ahmadin, 2023). Penelitian Pemerintah Kota Surakarta (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan berkelanjutan di Kota Solo tidak terlepas dari upaya sistematis untuk mendokumentasikan dan mengintegrasikan kearifan lokal seperti sistem *nguri-uri* (memelihara) budaya Jawa ke dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Proses ini difasilitasi oleh antropolog yang bekerja sama

dengan tokoh masyarakat, sejarawan lokal, dan perangkat kelurahan. Tanpa peran ini, kearifan lokal tetap berada dalam ranah informal dan tidak akan pernah menjangkau meja perumusan kebijakan.

Temuan ketiga mengindikasikan bahwa antropolog berperan sebagai perantara jalinan komunikasi dan mediator atas konflik antara pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, swasta, LSM) dengan masyarakat lokal yang sering kali memiliki kepentingan dan perspektif berbeda. Dengan demikian, seperti pendapat Spradley (2016) menekankan bahwa metode etnografi dengan pendekatan emik (pandangan dari dalam) memungkinkan antropolog untuk memahami dunia sosial masyarakat sebagaimana mereka memahaminya sendiri, sehingga antropolog dapat mengartikulasikan aspirasi, kekhawatiran, dan usulan masyarakat ke dalam forum-forum perencanaan pembangunan. Dalam studi Setiawan dan Haryanto (2019) tentang revitalisasi Kampung Pelangi dan Kampung Bustaman di Semarang, keterlibatan antropolog dan desainer partisipatif terbukti mampu menjembatani kesenjangan komunikasi antara warga kampung dengan Dinas Tata Ruang Kota. Awalnya, warga menolak program revitalisasi karena khawatir akan tergusur atau kehilangan identitas kampungnya. Antropolog kemudian melakukan pendekatan etnografis selama enam bulan untuk memahami nilai-nilai yang melekat pada kampung tersebut—seperti sejarah perjuangan, jaringan kekerabatan, dan ritual tahunan—lalu menyusun rekomendasi kebijakan yang mengakomodasi kekhawatiran tersebut.

Temuan keempat menjelaskan bahwa hambatan terbesar dalam memasukkan peran antropolog ke dalam proses perencanaan pembangunan sebenarnya bukan disebabkan oleh minimnya bukti mengenai kontribusi positif mereka, melainkan oleh lemahnya kemauan politik (*political will*) serta rendahnya pemahaman para pembuat kebijakan terhadap pentingnya aspek sosial budaya. Berkes (2018) menyatakan bahwa cara pandang yang masih mendominasi dunia pembangunan sangat dipengaruhi oleh teori ekonomi neoklasik dan pendekatan manajerial yang teknokratis, di mana budaya dianggap sebagai variabel sisa yang bisa diabaikan atau "dikendalikan" melalui metode-metode mekanistik. Escobar (2011) bahkan mengajukan argumen yang lebih kritis bahwa wacana pembangunan itu sendiri sesungguhnya berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan dominasi Barat serta hubungan ketergantungan negara-negara Selatan terhadap negara-negara Utara. Akibatnya, kehadiran antropolog—terutama mereka yang berpandangan kritis—sering dipersepsikan sebagai "pengganggu" yang memperlambat jalannya proyek atau mempersulit pengambilan keputusan. Di tingkat lokal, Setiawan dan Haryanto (2019) menemukan bahwa meskipun pemerintah kota di Indonesia kini semakin terbuka terhadap pendekatan partisipatif, alokasi anggaran untuk studi antropologis sebelum pembangunan sering kali dipotong karena dianggap tidak memberikan hasil yang produktif secara langsung.

## 4. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun antropolog memiliki posisi yang sangat krusial, peran mereka masih sering tersisihkan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah perkotaan yang berlandaskan pada kearifan lokal. Dari hasil telaah pustaka, teridentifikasi empat fungsi utama antropolog, yakni: (1) bertindak sebagai peneliti, pencatat, serta pengubah kearifan lokal menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan; (2) berperan sebagai penghubung komunikasi sekaligus perantara dalam menyelesaikan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan (pemerintah, swasta, LSM) dengan masyarakat lokal yang majemuk; (3) bertugas melakukan penilaian dampak sosial budaya (*Social Impact Assessment*) secara menyeluruh dan mendalam, bukan hanya sekadar formalitas administratif; serta (4) berfungsi sebagai pengkritik wacana pembangunan yang sanggup mengungkap asumsi-asumsi tersembunyi dan hubungan kekuasaan yang mewarnai berbagai proyek pembangunan. Apabila antropolog tidak dilibatkan, proyek pembangunan di kawasan kota besar berpotensi besar mengalami kegagalan, ditolak oleh warga, memicu perselisihan sosial, serta mengikis nilai-nilai budaya setempat yang sesungguhnya dapat menjadi aset sosial bagi

pembangunan itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Ahmadin, A. (2023). Public space as a tourism object: the existence of Pakui Sayang Park in Makassar City. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 6(3), 220–225.
- Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.
- Clifford, J., & Marcus, G. E. (Eds.). (1986). *Writing culture: The poetics and politics of ethnography*. University of California Press.
- Dahlan, M. (2023). Pembangunan Sektor Pariwisata Berbasis Budaya Lokal di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Riset Pembangunan*, 1(4).
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Djumaty, B. L., Primawati, Ahmadin, N. H., Afifah, I., Dey, N. P. H., Tubagus, S., Salim, K., Tambunan, A. A., Wijaya, M. H. D., & Yudawisastra, H. G. (2025). *Pengantar Sosiologi Konsep dan Praktik*. Penerbit Widina.
- Escobar, A. (2011). *Encountering development: The making and unmaking of the Third World* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Kottak, C. P. (2015). *Cultural anthropology: Appreciating cultural diversity* (16th ed.). McGraw-Hill Education.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Latour, B. (2004). *Politics of nature: How to bring the sciences into democracy*. Harvard University Press. [Sebagaimana dikutip dalam Escobar, 2011]
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Surakarta. (2022). *Laporan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Surakarta*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
- Rahman, A., Wirastika Sari, N. M., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Ode Amane, A. P., Ahmadin, & Alaslan, A. (2022). Metode Penelitian Ilmu Sosial. In *Metode Pengumpulan Data (Klasifikasi, Metode Dan Etika)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Setiawan, B., & Haryanto, R. (2019). Desain partisipatif dan revitalisasi kampung kota: Studi kasus Kampung Pelangi dan Kampung Bustaman Semarang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 30(1), 41–58.
- Spradley, J. P. (2016). *The ethnographic interview*. Waveland Press. (Edisi bahasa Indonesia: *Metode etnografi*. Tiara Wacana)
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zulkarnaen, T. A., Dahlan, M., & Ahmadin, M. (2022). Konstruksi Sosial, Budaya dan Ekonomi pada Pola Makan Masyarakat Kelurahan Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 6(2), 97–104.